

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh, desa memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing (Timotius 2018). Sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Alokasi Dana Desa (ADD), pemilihan kepala desa (kades) serta proses pembangunan desa. Oleh karena itu, Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dengan adanya pengelolaan keuangan desa menunjukkan adanya hak otonomi desa dalam mengelola alokasi dana desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

keuangan desa dan adanya Alokasi Dana Desa atau disingkat dengan ADD. Adanya ADD menuntut pemerintah desa semakin terbuka dalam proses akuntansi serta manajemen keuangannya sehingga desa dapat mengelola keuangannya dan melaporkan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran baik itu pendapatan maupun belanja. Dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, juga mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Akuntansi keuangan daerah bertujuan menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian laporan keuangan desa dapat diterima dan dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Apabila laporan keuangan dapat disampaikan dengan baik dan tepat waktu, maka kinerja keuangan pemerintah desa juga akan baik. Adapun laporan pertanggungjawaban akhir tahun yang harus disampaikan

oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran meliputi: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Menurut (Hanifah and Praptoyo 2015) Secara prinsip masih banyak desa yang memiliki permasalahan yang terkait dengan laporan keuangan desa, antara lain : (1) Sering terjadi keterlambatan laporan keuangan dalam penyampaian dari desa ke kecamatan, (2) Masih lemahnya perangkat desa dalam pemahaman PP No.32 tahun 2004, (3) masih lemahnya skill (keterampilan) terkait kreativitas laporan keuangan, (4) Masih lemahnya infrastruktur terkait teknologi informasi (internet), (5) Dalam laporan keuangan yang dibuat oleh kepala desa selama ini masih bersifat konvensional (tradisional). Permasalahan tersebut muncul salah satunya karena tidak berlakunya standar pelaporan keuangan di desa, namun pada tahun 2015 Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) mengeluarkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dimana pedoman ini berusaha memberikan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan desa dengan cara yang mudah sehingga tidak akan membuat ketakutan bagi siapapun untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa dengan baik.

Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Menurut Baswir (2000:7), Akuntansi Pemerintah merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bertujuan tidak mencari laba. Walaupun lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, namun sebagaimana dalam perusahaan ia tergolong sebagai lembaga mikro. Arif, dkk (2002:3) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Sedangkan Halim (2002:143) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Nordiawan, dkk (2012:4) dalam (Sartika and Nini 2018) mengatakan ada beberapa karakteristik organisasi pemerintahan, antara lain a. Pendirian, pembentukan, dan kegiatan organisasi pemerintahan bukan dengan tujuan atau bermotif mengejar keuntungan semata-mata. b. Organisasi pemerintahan dimiliki secara kolektif oleh rakyat. Dengan demikian,

tidak terdapat saham yang dapat dimiliki secara individual yang dapat diperjual belikan atau dipertukarkan. c. Pihak – pihak yang memberikan sumber keuangan kepada organisasi pemerintah tidak harus menerima imbalan langsung atau proporsional, baik berupa barang, uang atau jasa. d. Anggota atau masyarakat, sadar atau tidak, kadang-kadang dipaksakan menyetorkan uang, barang, atau jasa kepada pemerintah dimana pemerintah akan mempergunakan setoran tersebut untuk kepentingan bersama masyarakat.

Karakteristik organisasi pemerintah akan mempengaruhi karakteristik akuntansi pemerintah, adapun menurut Baswir karakteristik akuntansi pemerintah terdiri dari: a. Karena keinginan mengejar laba tidak inklusif di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan; b. Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi juga tidak perlu dilakukan; c. Karena sistem akuntansi pemerintahan suatu Negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu Negara yang lain, tergantung pada sistem pemerintahannya; d. Karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk mencatat, menggolong- golongkan,, meringkas dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu Negara maka

penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap Negara.

Keuangan desa yang didapatkan dari sumber pendapatan desa haruslah dikelola dengan baik demi tercapainya pembangunan desa. Melalui kebijakan dana desa, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat diharapkan bisa meningkat. Alokasi anggaran yang disediakan pemerintah terus bertambah namun peningkatan alokasi dana desa ternyata malah diiringi peningkatan korupsi. Pelaksanaan penetapan prioritas penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan masyarakat harus sesuai dengan aturan Standar Operasional Prosedur (SOP), apabila desa tidak mempunyai SOP yang baik tidak mungkin SOP ini dapat berjalan dengan baik tanpa adanya SDM yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dalam menjalankannya. Maka diperlukan adanya pengoptimalisasian sumber daya manusia dengan penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensinya.

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin pesat, begitu juga dengan pengelolaan keuangan desa yang dalam penerapannya menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang ditentukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan agar kualitas pelaporan keuangan desa menjadi lebih baik disisi lain sebagai cara untuk memperbaiki pengelolaan keuangan desa pada tahapan penatausahaannya. Hal tersebut dapat

menjadi salah satu cara agar tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) karena aplikasi sistem ini akan langsung terhubung oleh pusat. Sehingga keraguan atas pengelolaan keuangan yang ada di desa dapat diminimalisir. Selain itu dengan adanya Siskeudes akan lebih efektif, efisien serta ekonomis dalam pelaporan keuangan desa.

Siskeudes mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2015. Akan tetapi pada pemerintahan Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto baru menerapkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada tahun 2017. Kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan desa dan mengimplementasikan pengelolaan keuangan desa ke dalam aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) yang sudah disediakan adalah merupakan faktor yang akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang meliputi prinsip akuntabilitas, transparansi serta partisipasi. Dilakukannya penelitian ini untuk menganalisa bagaimana tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan Siskeudes serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan terhadap pelaksanaan Siskeudes yang ada pada Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yuliansyah & Munandar. (2017) yang berjudul “Kepatuhan Aparatur Desa dalam

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 diwilayah Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas” Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan observasi.menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa yang ada cukup baik hampir seluruh desa telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan Permendagri, Kendala yang terjadi adalah kurang diadakannya pelatihan teknis dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Meutia and Liliana 2017) yang berjudul “Pengelolaan Keuangan Desa” penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara survei, dan wawancara. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di desa yang menjadi objek penelitian telah sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Fitrianti 2018) yang berjudul Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bumiratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dan pembahasan terkait implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskuedes) di Desa Bumiratu yaitu



dilihat dari model Charles O Jones penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskuedes dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskuedes sampai saat ini Desa Bumiratu sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskudes.

Alasan peneliti melakukan penelitian mengenai pengelolaan keuangan desa disebabkan karena pernah terjadinya penyelewengan anggaran desa yang dilakukan oleh perangkat desa. Dalam pengelolaan keuangan dana desa, kemampuan sumber daya manusia serta sistem yang diterapkan dalam mengelolah keuangan desa merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya salah satu indikator dari tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) yaitu akuntabilitas. Dengan menerapkan prinsip akuntansi yang benar dan tepat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan pengujian atas pengelolaan keuangan desa.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian tersebut. Sehingga peneliti ingin melakukan penelitian tentang bagaimana pengelolaan keuangan dana desa di desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan harapan agar hasil dari penelitian dapat ditemukan titik terang agar pemerintahan desa dapat berkembang.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan SISKEUDES yang ada pada Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaksanaan SISKEUDES pada Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan pengujian bagaimana tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan SISKEUDES yang ada pada Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.
2. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan pengujian apa saja factor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan pelaksanaan SISKEUDES yang ada pada Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah desa yang bersangkutan maupun masyarakat mengenai tingkat kepatuhan pelaksanaan SISKEUDES dan apa saja factor yang mempengaruhi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan SISKEUDES yang ada pada Desa Kedung Maling Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

## **2. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi oleh peneliti selanjutnya mengenai bagaimana tingkat kepatuhan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SISKEUDES.